

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE***

**TESIS**

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar Magister  
Pendidikan pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan



oleh:

**Dwi Hermawan  
NIM. 2113208**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**2024**

**LEMBAR HAK CIPTA**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE***

**Oleh:  
Dwi Hermawan**

Sebuah tesis yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Pendidikan (M.Pd.) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Dwi Hermawan  
Universitas Pendidikan Indonesia  
2024

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang,  
difotocopy, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN

DWI HERMAWAN  
2113208

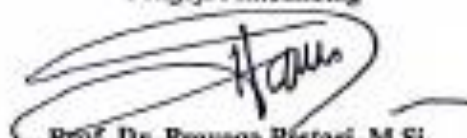
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DALAM MEWUJUDUKAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*

Disetujui dan disahkan oleh  
Penguji/Pembimbing



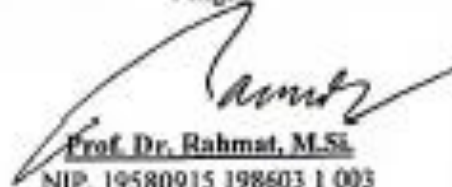
Prof. Dr. Cecap Darmawan, S.Pd., S.IP., S.A.P., S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 19690929 199402 1 001

Penguji/Pembimbing



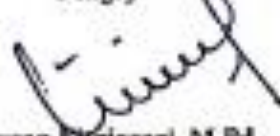
Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si.  
NIP. 19750414 200501 1 001

Penguji



Prof. Dr. Rahmat, M.Si.  
NIP. 19580915 198603 1 003

Penguji



Dr. Susan Fitriyani, M.Pd.  
NIP. 19820730 200912 2 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
Program Magister dan Doktor Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. Cecap Darmawan, S.Pd., S.IP., S.A.P., S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 19690929 199402 1 001

## ABSTRAK

**Judul : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang dalam Mewujudkan *Good University Governance***

**Nama : Dwi Hermawan (2113208)**

Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan akses terhadap informasi publik, pemerintah diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi guna memastikan ketersediaan informasi yang lebih cepat, sederhana, dan ekonomis. Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Melalui peran pentingnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan berintegritas, UNNES mengambil langkah-langkah penting dalam implementasi *good university governance*. Berdasarkan pra-penelitian melalui pengamatan pemberian layanan dan dokumen terkait keterbukaan informasi publik di UNNES, UNNES memiliki sejumlah tantangan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini sejalan dengan Mark Bovens (1996) yang mengutarakan tentang model pengembangan *good governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara di UNNES dalam mewujudkan *good university governance*, menganalisis pemenuhan hak warga negara untuk dapat mengakses keterbukaan informasi publik di UNNES dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, dan mengidentifikasi kendala dalam pemenuhan hak warga negara untuk dapat mengakses keterbukaan informasi publik di UNNES. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, praktik keterbukaan informasi publik di UNNES sudah cukup baik. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di UNNES telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan *good university governance*. Kedua, UNNES telah memenuhi hak akses warga negara terhadap informasi publik yang dimilikinya. Kanal-kanal yang disediakan oleh UNNES telah mendukung pemenuhan hak warga negara untuk bisa mengakses informasi publik di UNNES. Ketiga, kendala pemenuhan hak warga negara untuk mengakses keterbukaan informasi publik di UNNES disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran warga negara dan keterbatasan akses teknologi warga negara.

**Kata Kunci : *Good University Governance*, Keterbukaan Informasi Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang**

## ABSTRACT

**Title** : *Implementation of Public Information Disclosure Policy at Semarang State University in Realizing Good University Governance*

**Name** : *Dwi Hermawan (2113208)*

*Along with the increasing public demand for access to public information, the government is expected to have the ability to develop innovations to ensure the availability of information that is faster, simpler, and more economical. Semarang State University (UNNES) as a Public Body has the responsibility to implement the principle of public information disclosure. Through its important role in creating a transparent and integrated educational environment, UNNES has taken important steps in implementing good university governance. Based on pre-research through observations of service delivery and documents related to public information disclosure at UNNES, UNNES has several challenges in realizing public information disclosure. This study is in line with Mark Bovens (1996) who expressed the good governance development model. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation studies. This study aims to examine the implementation of the public information disclosure policy as a citizen's right at UNNES in realizing good university governance, analyze the fulfillment of citizens' rights to be able to access public information disclosure at UNNES from the perspective of citizenship education and identify obstacles in fulfilling citizens' rights to be able to access public information disclosure at UNNES. The results of the study show three main things. First, the practice of public information disclosure at UNNES is quite good. The implementation of the public information disclosure policy at UNNES has had a positive impact on realizing good university governance. Second, UNNES has fulfilled citizens' right to access public information. The channels provided by UNNES have supported the fulfillment of citizens' rights to access public information at UNNES. Third, the obstacles to fulfilling citizens' rights to access public information disclosure at UNNES are caused by several things, such as the lack of citizen awareness and the limited access to technology by citizens.*

**Keywords:** *Citizenship Education, Good University Governance, Public Information Disclosure, Semarang State University.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	12
1.3    Tujuan Penelitian .....	12
1.3.1    Tujuan Umum .....	12
1.3.2    Tujuan Khusus .....	13
1.4    Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1    Secara Teoretis .....	13
1.4.2    Secara Praktis .....	14
1.4.3    Segi Kebijakan .....	15
1.4.4    Segi Isu Sosial dan Aksi Sosial .....	15
1.5    Struktur Organisasi Tesis .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1    Landasan Teori.....	18
2.2    Kebijakan Publik.....	18
2.2.1    Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.2.2    Kebijakan Publik dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan ....	36
2.3    Keterbukaan Informasi Publik .....	38
2.3.1    Hak Warga Negara dalam Akses Informasi Publik .....	38
2.3.2    Perguruan Tinggi dan Keterbukaan Informasi Publik.....	39

2.3.3	Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan .....	40
2.4	<i>Good University Governance</i> .....	43
2.4.1	Perguruan Tinggi dan <i>Good University Governance</i> .....	43
2.4.2	Implementasi <i>Good University Governance</i> .....	44
2.4.3	<i>Good University Governance</i> dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan .....	46
2.4.4	Hubungan <i>Good University Governance</i> dan Keterbukaan Informasi Publik .....	47
2.5	Penelitian Terdahulu .....	48
2.6	Kerangka Berpikir .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>59</b>
3.1	Desain Penelitian .....	59
3.1.1	Pendekatan Penelitian .....	59
3.1.2	Metode Penelitian .....	60
3.2	Partisipan dan Tempat Penelitian .....	62
3.2.1	Partisipan Penelitian .....	62
3.2.2	Tempat Penelitian .....	62
3.3	Tahapan Penelitian .....	63
3.3.1	Tahapan Pra Penelitian .....	63
3.3.2	Tahapan Pelaksanaan Penelitian .....	64
3.3.3	Tahapan Pasca Penelitian .....	64
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.4.1	Observasi .....	65
3.4.2	Wawancara .....	66
3.4.3	Studi Dokumentasi .....	68
3.5	Teknik Analisis Data .....	68
3.5.1	<i>Data Reduction</i> (Reduksi Data) .....	70
3.5.2	<i>Data Display</i> (Penyajian Data) .....	71
3.5.3	Verifikasi dan Kesimpulan .....	71
3.6	Jadwal Penelitian .....	72

<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
4.1    Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	73
4.2    Temuan Penelitian.....	84
4.3    Pembahasan Temuan Penelitian.....	97
4.3.1  Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Hak Warga Negara di Universitas Negeri Semarang dalam Mewujudkan <i>Good University Governance</i> .....	97
4.3.2  Pemenuhan Hak Warga Negara untuk Dapat Mengakses Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan .....	113
4.3.3  Kendala dalam Pemenuhan Hak Warga Negara untuk Dapat Mengakses Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan .....	119
<b>BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>124</b>
5.1    Simpulan .....	124
5.2    Implikasi.....	126
5.2.1  Implikasi Teoretis.....	126
5.2.1  Implikasi Praktis.....	127
5.3    Rekomendasi .....	128
5.3.1  Bagi Pihak Universitas Negeri Semarang .....	128
5.3.2  Bagi Pihak PPID Universitas Negeri Semarang .....	128
5.3.3  Bagi Pihak Pengguna Layanan Informasi Universitas Negeri Semarang.....	129
5.3.4  Bagi Pihak Komisi Informasi Pusat .....	129
5.3.4  Bagi Pihak S1 PPKn UNNES .....	129
5.3.4  Bagi Pihak S2 PKn UPI .....	129
5.3.7  Bagi Peneliti Selanjutnya .....	130



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Distribusi Kategori Hasil Monev bagi PTN .....	7
<b>Tabel 1.2</b> Komparasi Capaian Monitoring dan Evaluasi PTNBH .....	10
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	48
<b>Tabel 3.1</b> Daftar Narasumber .....	68

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Kualifikasi Badan Publik.....	5
<b>Gambar 1.2</b> Penilaian Terhadap Badan Publik.....	5
<b>Gambar 1.3</b> Badan Publik yang Melakukan Registrasi.....	6
<b>Gambar 1.4</b> Badan Publik yang Mengisi Kuesioner .....	6
<b>Gambar 2.1</b> Landasan Teori .....	23
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Berpikir .....	56
<b>Gambar 3.1</b> Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data .....	69
<b>Gambar 3.2</b> Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	70

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Kamus Webster*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Banisar, D., & Davies, S. (1999). Global trends in privacy protection: An international survey of privacy, data protection, and surveillance laws and developments. *J. Marshall J. Computer & Info. L.*, 18, 1.
- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.*
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Creswell, J. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ (2012). *Research Design: pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ (2013). *Steps in conducting a scholarly mixed methods study*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington: congressional quarterly press.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Haryatmoko, J. (2017). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan* (H. Zaskuri (ed.)). Jakarta: PT Pena Nusantara.
- Henard, F., & Mitterle, A. (2010). *Governance and quality guidelines in Higher Education. A review of governance arrangements and quality assurance*. Berlin: OECD.
- Keban, T. Y. (1994). *Pengantar Administrasi Publik. Program MAP UGM, Yogyakarta.*
- Kuckartz, U. (2013). *Qualitative text analysis: A guide to methods, practice and using software. Qualitative Text Analysis.*
- Miles, M. B. D. A. (1992). Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode–metode Baru.*

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publisher.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi kualitatif. *Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_ (2009). Metodologi Penelitian Kualitative. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muzaqqi, F. (2019). Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia. Airlangga University Press.
- Patilima, H. (2011). Metode Penulisan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Putra, F. (2019). Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik: perubahan dan inovasi kebijakan publik dan ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rawls, J. (1971). *Atheory of justice*. Cambridge (Mass.).
- Rein, M. (2017). *From policy to practice*. Routledge.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). Policy implementation and bureaucracy. (*No Title*).
- Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, B. D., & Si, M. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: PT. *Reneka Cipta*.
- Syaukani, H. R. (2002). *Titik temu dalam dunia pendidikan: tanggung jawab pemerintah, pendidik, masyarakat, & keluarga dalam membangun bangsa*. Jakarta: Nuansa Madani.
- UNESCO. (2015). Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel. Paris: UNESCO.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan modelmodel implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijatno, S. (2009). Pengelolaan perguruan tinggi secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan. Penerbit Salemba Empat.

## 2. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Faizin, A., & Mansur, A. (2018). Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wibisono, A. G. (2014). *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

### 3. Artikel Jurnal

Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270.

Aksioma, M., & Syahza, A. (2019). Keterbukaan informasi publik sebagai landasan akuntabilitas pemerintahan. *Jurnal Media Hukum*, 26(1), 107-118. <https://doi.org/10.22146/jmh.31849>.

Arifin, M. (2018). Akses Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 254-266.

Athie, L., & Braga, T. (2019). *Access to information and democratic accountability: Transparency and participation in Brazil*. In J. Grimmelikhuisen, S. Meijer, A. O. Ojo, & A. Radulova (Eds.), *Open government: Opportunities and challenges for public governance* (pp. 65-79). Springer.

Bakke, R. (2019). *Transparency, trust, and citizen participation in local governance*. *Local Government Studies*, 45(1), 77-94. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1486352>

Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework I*. *European law journal*, 13(4), 447-468.

Bovens, M. (1996). *The integrity of the managerial state*. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 4(3), 125-132.

Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45.

Darmawan, C. (2015). *Legislative Strengthening and Empowerment: Efforts To Strengthen Local Governance and Accountability Through Provincial Parliaments in Indonesia*. *American Journal of Applied Sciences*, 12(11), 802.

Howlett (2018). The criteria for effective policy design: Character and context in policy instrument choice. *Journal of Asian Public Policy*, 11(3), 245-266.

Mulyadi, M. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15(1), 128-137.

- Nababan, M. R. (2018). Keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik dalam pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 315-326. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.2471>.
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*. Volume 7, Nomor 1, Januari 2019.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; Or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation* (Vol. 708). Univ of California Press.
- Putra, Antoni. (2017). Memperkuat Tata Kelola. Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Integritas*. Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
- Rahman, M. M., & Islam, M. Z. (2017). *Government Communication in Developing Countries: An Empirical Investigation in Bangladesh*. *Public Relations Review*, 43(2), 278-288.
- Rosales, R. (2020). *Transparency and corruption: Exploring the relationship between access to information and corruption in Latin America*. *International Journal of Public Administration*, 43(3), 263-275. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1643577>.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy studies journal*, 8(4), 538-560.
- Setiawan, D. (2018). Kendala dan Hambatan dalam Akses Informasi Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 222-234.
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi pemerintahan: mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Surip, M dan Hendra Kurnia Pulungan. (2018). *The Implementation of Public Information Disclosure Through People's Online Complaints Integrated on Information and Services Center in Medan State University, Indonesia*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCIJournal). Volume I, No 3, October 2018.
- Syahrudin. (2017). Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 1-10.

- Tjoetra, Afrizal. (2018). Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Community: Volume 4, Nomor 2*, Oktober 2018.
- Tsai, L. L. (2019). Open data and government transparency in China: Opportunities and challenges. In J. Grimmelikhuijsen, S. Meijer, A. O. Ojo, & A. Radulova (Eds.), *Open government: Opportunities and challenges for public governance* (pp. 239-253). Springer.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & society*, 6(4), 445-488.
- Wahyudi, T. (2020). Keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam pemerintahan Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(1), 61-70. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.1.2020.61-70>.
- Wijaya, Y. A., Yudhawati, N. L. P. S., & Ilmy, S. K. (2022). Development of Nursing Concept and Theory Model: Differences And Identification of Nursing Theory Group Between Theory, Grand Theories, Middle Range Theory and Nursing Practice Theory.
- Yulianto, Y. (2021). Keterbukaan informasi publik dalam pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 123-144. <https://doi.org/10.31078/jk1810>.

#### **4. Dokumen**

- Grindle, M. S. (1989). *The new political economy positive economics and negative politics* (Vol. 304). World Bank Publications.
- Komisi Informasi Pusat. (2022). Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2022.

#### **5. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab atas Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2016.

Permenristekdikti RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7864/UN40/HK/2021 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2021.

Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/62/UN37/HK.02/2023 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Semarang Tahun 2023